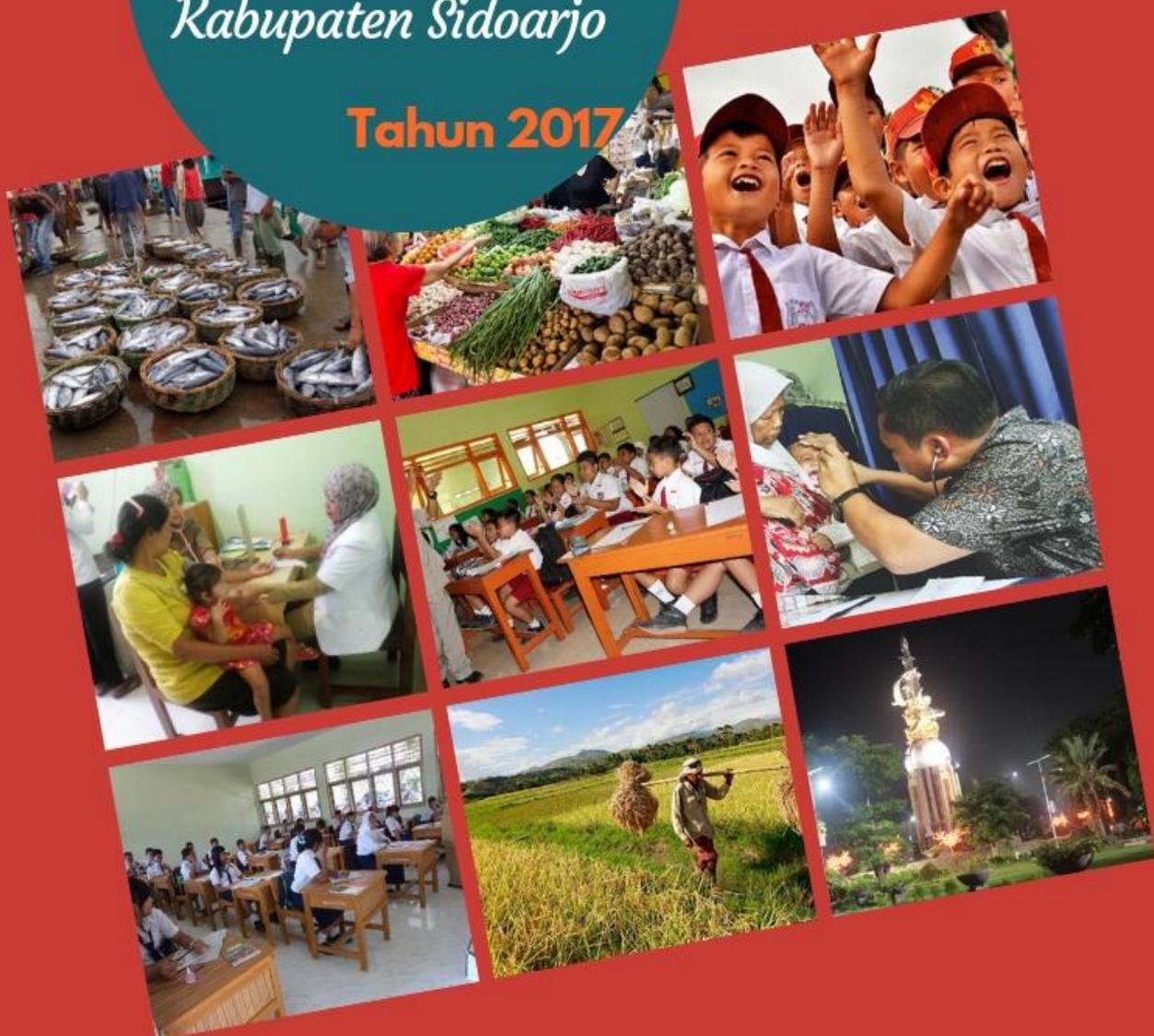


Booklet

*Indeks Pembangunan
Manusia
Kabupaten Sidoarjo*

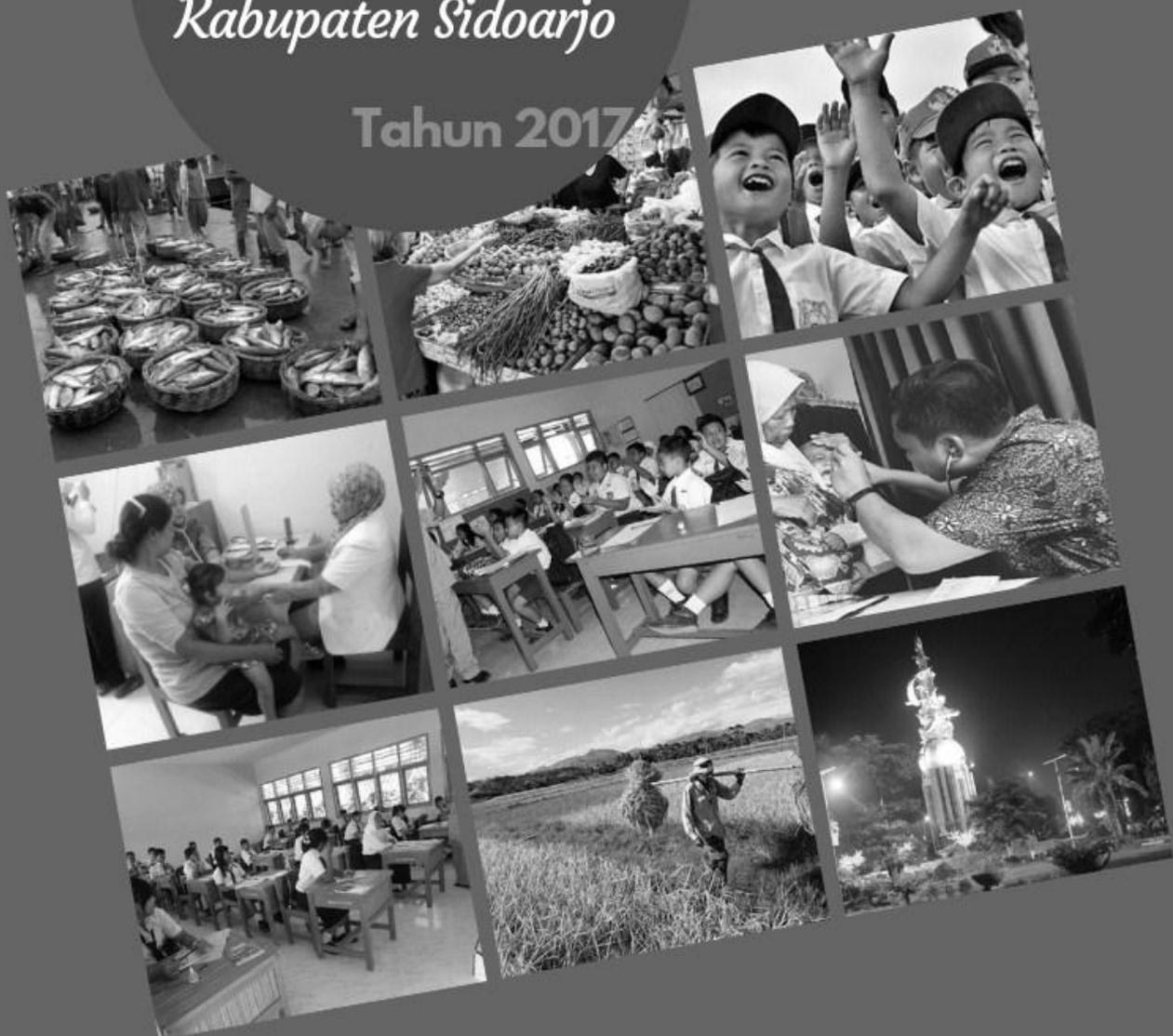
Tahun 2017



Booklet

*Indeks Pembangunan
Manusia
Kabupaten Sidoarjo*

Tahun 2017



***Booklet Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017***

**BOOKLET INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2017**

Nomor Katalog : 4102002.3515
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 37 + viii halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Perancang Sampul :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

CETAKAN KE - 2

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan / atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 ini merupakan publikasi kelanjutan terbitan dari buku sejenis yang pernah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Buku ini berisikan angka IPM Tahun 2017.

Angka-angka yang disajikan dalam buku ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS dan juga data-data dari dinas instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini dan kami juga menghargai saran maupun kritik yang bersifat membangun demi kebaikan penerbitan buku berikutnya.

Akhirnya kami berharap semoga penulisan buku ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Sidoarjo, 22 Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sidoarjo,



Ir. Patris Sayogyo, MM
NIP. 19610410 199003 1 001 MA.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. GAGASAN PEMBANGUNAN MANUSIA.....	1
.....	
1.1 Ide Dasar	1
1.2 Indeks Pembangunan Manusia	4
1.3 Manfaat IPM	6
2. TRANSFORMASI METODOLOGI IPM	7
2.1 Perubahan Metodologi IPM	7
2.2 Perlunya Perubahan Metodologi Penghitungan IPM	10
2.3 Indikator Yang Berubah	10
2.4 Pengelompokan IPM	13
2.5 Menghitung Indeks Komponen IPM	14
2.5.1 Dimensi Kesehatan	14
2.5.2 Dimensi Pendidikan	15
2.5.3 Dimensi Pengeluaran	18
3. CAPAIAN IPM KABUPATEN SIDOARJO	23
3.1 IPM dalam Cakupan Dunia, Nasional dan Daerah	23
3.2 Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo	24
3.3 Komponen IPM Kabupaten Sidoarjo	26
3.3.1 Dimensi Kesehatan	26
3.3.2 Dimensi Pendidikan	27
3.3.3 Dimensi Pengeluaran	29
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	12
Tabel 2.2	Penentuan Maksimum Minimum Komponen Penghitungan IPM ...	12
Tabel 2.3	Penentuan Angka Lama Sekolah Komponen Penghitungan YMS	16
Tabel 2.4	Jenjang Pendidikan dan Skor untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (YMS)	16
Tabel 3.1	Angka IPM dan Rangking IPM Kabupaten Kota Se-Jawa Timur Tahun 2017	25
Tabel 3.2	Angka Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017	26
Tabel 3.3	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017	28
Tabel 3.4	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017	29
Tabel 3.5	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	9
Gambar 3.1	Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Sidoarjo (persen) Tahun 2013-2017	30

1.1. Ide Dasar

Implementasi Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah berimplikasi pada munculnya hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan kedua undang-undang tersebut paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran, yaitu dari sentralis menuju system desentralis. Dampak yang langsung dirasakan adalah semakin besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Diharapkan dengan desentralisasi atau yang lebih populer disebut otonomi daerah dapat memotivasi daerah-daerah tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan mengurangi kemiskinan dan mempersiapkan diri dalam sumberdaya manusia yang handal.

Di sisi lain PP No. 38 Tahun 2007 Pasal 7 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, diantaranya adalah pelayanan dasar yang mencakup kegiatan statistik dan perencanaan pembangunan.

Kata “Pembangunan” dapat diartikan sebagai adanya perubahan atau perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya. Pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat telah banyak membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Namun pembangunan itu sendiri juga menyisakan berbagai persoalan dan tuntutan baru seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, kualitas hidup manusia, kesempatan kerja, penegakan hukum, lingkungan hidup dan masih banyak lagi.

Keberhasilan masa depan suatu daerah terletak pada pengelolaan produktifitas, pengusahaan perubahan dan pengelolaan pembangunan kerja secara cepat. Masyarakat kita tergantung pada spesialisasi dari berbagai spesifik untuk menyediakan output input yang dihasilkan dan didapat untuk menghindari pengangguran berstruktur, sehingga menaikkan kualitas taraf hidup masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran di suatu daerah.

Di era modernisasi sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mendukung pemerintah dalam mengatur tatanan pemerintahan maupun tatanan masyarakat yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi mencapai kehidupan yang lebih baik diperlukan proses yang selaras, seimbang dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, makna pembangunan suatu perubahan masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Dengan mengamati perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial, maka dapat dijadikan sebagai Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses yang mensyaratkan kebebasan untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, pembangunan manusia mencakup konsep yang lebih luas dari sekedar menempatkan manusia sebagai tujuan akhir maupun sebagai alat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia lebih merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Perspektif pembangunan manusia merupakan sebuah pemikiran radikal dalam konsep pembangunan. Perspektif ini menggantikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita yang digunakan oleh perencana kebijakan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dipandang dari sisi perdagangan, investasi, dan teknologi merupakan hal yang esensial. Akan tetapi, hal itu hanya melihat manusia sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan, dan bukan sebagai tujuan dari pembangunan.

Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan Produk Domestik Bruto/PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan.

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu

dalam masyarakat, baik yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusianya.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia. (Sumber: HDR 1990 halaman 10)

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Programme UNDP). Standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan antara lain berhak untuk bisa membaca dan menulis, untuk hidup sehat, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, untuk mendapat rumah yang memadai, dan untuk hidup sebagai satu bangsa dengan damai dan aman.

Apapun komponen spesifik atas “kehidupan yang lebih baik” itu, pembangunan di semua masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial setiap individu.

1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Idealnya dibutuhkan banyak variabel dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Namun, dibutuhkan indikator yang tepat dan bisa terukur untuk memberikan gambaran yang pasti.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau **Human Development Index (HDI)** merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

UNDP menggunakan IPM ini sejak tahun 1990. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age 0: eo*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- A. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, berbagai kritik tentang IPM terus bermunculan. Pro dan kontra muncul terutama tentang pilihan indikator, penimbang, formula agregasi, konsep, dan lain sebagainya. Popularitas pembangunan manusia cukup tinggi.

Di Kabupaten Sidoarjo pada era tahun 2000-an, popularitas indeks pembangunan manusia masih kalah bersaing dengan pertumbuhan ekonomi dalam mengukur kinerja pembangunan. Periode tahun 2004-2008, popularitas pertumbuhan ekonomi jauh di atas pembangunan manusia.

Kini dengan semakin lajunya perkembangan teknologi dan dinamisnya ilmu pengetahuan, maka popularitas pertumbuhan ekonomi seiring sejalan dengan indeks pembangunan manusia dalam mengukur kinerja pembangunan.

1.3. Manfaat IPM

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk)
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah
3. IPM merupakan data strategis; selain sebagai ukuran kinerja pemerintah juga sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU)

2. 1. Perubahan Metodologi IPM

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia.

Tidak hanya itu, mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Karena itu terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot

sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometric untuk menghitung indeks komposit.

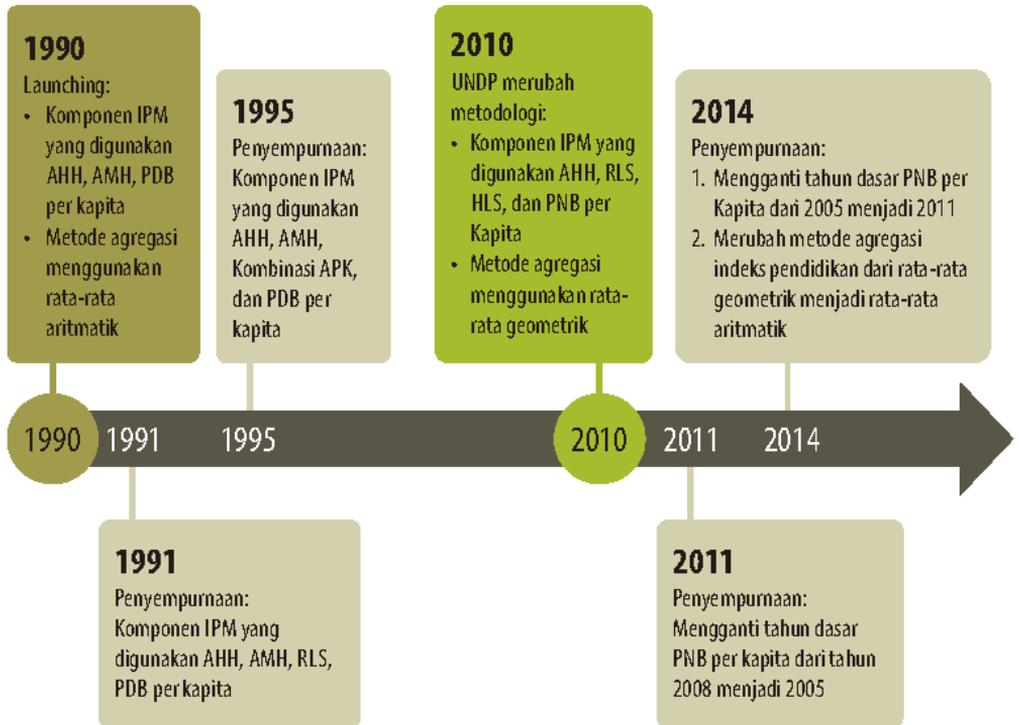
Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Penyempurnaan terakhir dilakukan di Tahun 2014. Penyempurnaan ini menggunakan metode baru. Metode ini menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), yaitu :

1. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Melek huruf tidak digunakan lagi karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik (angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi).

3. Capaian yang rendah pada salah satu komponen tidak dapat ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi (penghitungan *Arithmetic mean* diubah menjadi *Geometric mean*)

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



2. 2. Perlunya Perubahan Metodologi Penghitungan IPM

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan.

Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Kelemahan rata-rata aritmatik dalam menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antardimensi pembangunan manusia. Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

2. 3. Indikator Yang Berubah

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Tabel 2.1
Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMEN SI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS*
Keseha- tan	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)	Angka Harapan Hidup (e_0)
Pengeta- huan	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	1. <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>
	2. Kombinasi Angka Partisipasi	2. <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	2. <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	2. <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan
Agregasi	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$		Rata-rata Ukur	

Tabel 2.2
Penentuan Maksimum Minimum
Komponen Penghitungan IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
<i>Expected Years of</i>	Tahun	0	0	18	18
<i>Mean Years of Schooling</i>	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436 * (IDR)	107.721 (PPP U\$)	26.572.35 2** (IDR)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan

2. 4. Pengelompokan IPM

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

$IPM < 60$: IPM rendah

$60 < IPM < 70$: IPM sedang

$70 < IPM < 80$: IPM tinggi

$IPM < 80$: IPM sangat tinggi

2.5. Menghitung Indeks Komponen IPM

Setiap komponen IPM dihitung dahulu masing-masing sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan tiap komponen sebagai berikut :

2.5.1. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan direfleksikan oleh Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup waktu lahir (*expectation of life at birth*) yang biasanya dilambangkan dengan simbol e_0 dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Penghitungan indeks kesehatan sebagai berikut :

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$$

- Dimana, $I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks Kesehatan
 AHH = Angka harapan hidup
 AHH_{min} = Angka harapan hidup minimal
 AHH_{maks} = Angka harapan hidup maksimal

Dengan angka harapan hidup, dapat dilihat perkembangan tingkat kesehatan pada suatu wilayah serta dapat pula dilihat perbandingan tingkat kesehatan antar wilayah. Variabel e_0 (E_{0l}) diharapkan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya angka morbiditas (angka kesehatan) lebih valid tetapi karena keterbatasan data, maka yang digunakan adalah angka harapan hidup.

Angka harapan hidup dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan AHH negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi.

2.5.2. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dicerminkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk. Penghitungan indeks pendidikan (IP) menurut UNDP dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$
$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

dimana : I_{pendidikan} = Indeks Pendidikan

I_{HLS} = Indeks angka harapan sekolah

HLS = Angka harapan sekolah

HLS_{min} = Angka harapan sekolah minimal

HLS_{maks} = Angka harapan sekolah maksimal

I_{RLS} = Indeks rata-rata Lama sekolah

RLS = Angka rata-rata lama sekolah

RLS_{min} = Angka rata-rata lama sekolah minimal

RLS_{maks} = Angka rata-rata lama sekolah maksimal

A. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) dihitung dari jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini memiliki asumsi bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Kombinasi variabel pendidikan yang digunakan meliputi Angka Partisipasi Sekolah, Jenjang pendidikan yang pernah Diduduki, Kelas yang sedang Dijalani dan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan.

Penghitungan angka rata-rata lama sekolah melewati 6 tahap, yaitu :

1. Menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas.

2. Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki.
3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.
4. Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir.
5. Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir.
6. Menghitung lamanya bersekolah.

Tabel 2.3
Penentuan Angka Lama Sekolah
Komponen Penghitungan MYS

Keterangan	Lama Sekolah
Tidak Pernah Sekolah	0
Masih sekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih sekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1
	Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak sekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Tabel 2.4
Jenjang Pendidikan dan Skor
untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang Pendidikan	Skor
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Tamat SD	6
3. Tamat SLTP	9
4. Tamat SLTA	12
5. Tamat DI	13
6. Tamat DII	14
7. Tamat DIII/Sarmud/Akademi	15
8. Tamat D IV/ Sarjana	16
9. Tamat S2	18
10. Tamat S3	21

Untuk yang telah menamatkan sekolah langkah penghitungan adalah dengan memberi bobot variabel pendidikan yang ditamatkan/ jenjang pendidikan, selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya yang dirumuskan sebagai berikut:

$$RLS = \frac{\sum_i f_i \times S_i}{\sum_i f_i}$$

- Dimana, RLS = Rata-rata lama sekolah
 f_i = Frekuensi penduduk 25 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan ke -i
 S_i = Skor masing-masing jenjang pendidikan ke -i
 i = Jenjang pendidikan ($i=1,2,\dots,11$), lihat tabel 3.2.

Untuk yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan lama sekolah dihitung berdasarkan formula:

“ $YS = \text{Skor Sekolah yang ditamatkan} + \text{Kelas tertinggi yg pernah/ sedang diduduki} - 1$ “

Suatu misal seseorang yang bersekolah sampai kelas 2 SMU maka lama sekolahnya adalah, $YS = 9 + 2 - 1 = 10$ tahun.

B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penduduk yang dicakup dalam angka harapan sekolah adalah penduduk usia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Angka ini memiliki asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan penghitungan angka harapan sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Penghitungan angka harapan bersekolah melewati 4 tahap, yaitu :

1. Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas).
2. Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).
3. Menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

Menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua rasio penduduk masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

Formula penghitungan HLS adalah

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana,

- HLS = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
- E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
- P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t
- i = Usia (a, a + 1, ..., n)

2.5.3. Dimensi Pengeluaran

Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan didekati dengan membagi pengeluaran per kapita riil dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Penghitungan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan rumus :

$$\frac{Y}{PPP}$$

Dimana, Y = pengeluaran per kapita riil

PPP = paritas daya beli (Purchasing Power Parity)

Paritas Daya Beli merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Dalam konteks PPP di Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (provinsi/kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. PPP ini dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.

Dengan memasukkannya variabel PPP sebagai ukuran paritas daya beli, IPM secara konseptual lebih lengkap dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia. Dasar penghitungan PPP yang digunakan UNDP adalah *Gross National Product (GNP)*, yang telah disesuaikan dengan angka riil oleh *International Comparison Project (ICP)* sehingga dapat dibandingkan.

Untuk mengukur daya beli penduduk antar propinsi di Indonesia, metode lama masih menggunakan 27 jenis komoditi. Untuk penerapan pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP. Hal ini didasarkan pada pertimbangan share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada Tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada Tahun 2012. Sedangkan dengan metode baru terpecah menjadi sub makanan sebanyak 66 komoditas (39,8 %) dan sub non makanan 30 komoditas (36,9 %).

Rata-rata pengeluaran per kapita dihitung dengan rumus :

$$\overline{X}'_t = \frac{\overline{X}_t}{IHK_{(t, 2012)}} \times 100$$

\overline{X}'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

\overline{X}_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

IHK = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Penghitungan PPP dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung value (rupiah yang dikeluarkan) dan quantity (jumlah barang yang dikonsumsi) 96 komoditas PPP dari data Susenas MODUL Konsumsi.
2. Menghitung quantity komoditi perumahan dari data Susenas KOR.
3. Menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak dapat diperoleh dari Susenas modul konsumsi diproksi dengan harga dari IHK.
4. Menghitung relatif harga terhadap Jakarta Selatan.

Penghitungan PPP menggunakan metode Rao :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j
 p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
 m : jumlah komoditas

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

3. 1. IPM dalam Cakupan Dunia, Nasional dan Daerah

Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Capaian pembangunan manusia pada tahun 2016-2017 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan karena masih relatif tingginya ketimpangan pencapaian pembangunan antardaerah.

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Selama hampir 35 tahun, UNDP telah mencatat perkembangan pembangunan manusia yang cukup fantastis. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kemajuan pembangunan manusia tercepat di dunia dan masuk dalam *“World Top Movers in HDI Improvement”*.

UNDP mencatat selama kurun waktu 1980 hingga 2013, IPM Indonesia tumbuh 1,37 persen per tahun. Sementara itu, selama kurun waktu 2014 hingga 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Indonesia terus tumbuh pada kisaran 0,90 persen per tahun.

UNDP mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia telah mencapai 70,81 pada tahun 2017. Dengan capaian IPM itu, posisi status pembangunan manusia Indonesia telah melompat dari kategori “menengah” ke kategori “tinggi”.

Data rangking Indeks Pembangunan Manusia setahun sebelumnya mencatat bahwa Indonesia turun ke posisi 113 dari 188 negara dari 188 negara di dunia. Angka IPM ini telah meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir.

Dalam cakupan ASEAN, berdasarkan data dari *Human Development Report (HDR)*, dengan data terakhir tahun 2014 Indonesia masih menempati urutan ke lima (5), di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Dalam kurun waktu 1970 hingga 2010, Indonesia juga mencatat perkembangan pembangunan manusia yang menakjubkan sehingga masuk dalam “*World Top Mover in HDI Improvement*”.

Pada tahun 2017, capaian IPM Jawa Timur dari 34 provinsi di Indonesia berada pada posisi “tengah”, yaitu pada posisi ke-15 dengan angka IPM sebesar 70,27. Terlihat peningkatan yang menggembirakan. Pada tahun 2010-2011, posisi IPM Jawa Timur di peringkat 19. Tahun selanjutnya, 2012-2014 peringkatnya naik lagi di posisi 18. Pada tahun 2015-2016 peringkat IPM Jawa Timur kembali naik ke posisi 16. Dengan capaian IPM tersebut, posisi status pembangunan manusia Jawa Timur berada di kategori “menengah”.

3. 2. Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo

Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 8 tahun terakhir terus naik. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 adalah sebesar 78,70. Besaran IPM ini tergolong dalam kategori “tinggi”. Selama periode 2010-2016 angka IPM Kabupaten Sidoarjo sudah masuk dalam range “tinggi”. Pada tahun 2010 angka IPM Sidoarjo sebesar 73,75. Pada tahun 2011 sebesar 74,78; tahun 2012 sebesar 75,14; tahun 2013 sebesar 76,39; tahun 2014 sebesar 76,78 tahun 2015 sebesar 77,43 dan di tahun 2016 sebesar 78,17.

Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 8 tahun terakhir ini berada di atas Jawa Timur. Pada tahun 2017, dalam cakupan 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, posisi IPM Sidoarjo berada pada posisi keempat. Bahkan dalam cakupan kabupaten, Sidoarjo berada pada posisi pertama.

Pada tahun 2017, besaran IPM Kota Surabaya menduduki peringkat teratas; menggeser Kota Malang yang tahun sebelumnya berada posisi pertama. Kota Malang berada di peringkat kedua dan disusul dengan Kota Madiun dan Kabupaten Sidoarjo.

Capaian yang sangat menggembirakan ini tidak terlepas dari pemerintah daerah yang sellau melaksanakan program-program yang meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya.

Tabel 3.1
Angka IPM dan
Rangking IPM
Kabupaten Kota
Se-Jawa Timur
Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Rangking	Skor
Kota Surabaya	1	81.07
Kota Malang	2	80.65
Kota Madiun	3	80.13
Sidoarjo	4	78.70
Kota Kediri	5	77.13
Kota Blitar	6	77.10
Kota Mojokerto	7	76.77
Gresik	8	74.84
Kota Pasuruan	9	74.39
Kota Batu	10	74.26
Magetan	11	72.60
Mojokerto	12	72.36
Kota Probolinggo	13	72.09
Tulungagung	14	71.24
Lamongan	15	71.11
Jombang	16	70.88
Nganjuk	17	70.69
Kediri	18	70.47
Madiun	19	70.27
Banyuwangi	20	69.64
Blitar	21	69.33
Ngawi	22	69.27
Ponorogo	23	69.26
Malang	24	68.47
Trenggalek	25	68.10
Bojonegoro	26	67.28
Tuban	27	66.77
Pasuruan	28	66.69
Pacitan	29	66.51
Situbondo	30	65.68
Jember	31	64.96
Pamekasan	32	64.93
Bondowoso	33	64.75
Probolinggo	34	64.28
Sumenep	35	64.28
Lumajang	36	64.23
Bangkalan	37	62.30
Sampang	38	59.90

3. 3. Komponen IPM Kabupaten Sidoarjo

Untuk lebih detail lagi dalam mengulas IPM, maka disampaikan perkembangan pada masing-masing tiap komponen IPM.

3.3.1. Dimensi Kesehatan

Satu dari tiga komponen penyusun IPM adalah Angka Harapan Hidup. Indikator ini berguna dalam mengidentifikasi kualitas kesehatan, sebab pendapat umum mengatakan kesehatan yang baik akan memberikan peluang hidup yang lebih lama. Walaupun demikian, kesehatan bukan merupakan satu-satunya indikator peluang hidup lama seseorang.

Data pendukung dalam penghitungan angka harapan hidup adalah keberadaan jumlah anak yang dilahirkan hidup dan jumlah anak yang masih hidup. Jumlah anak yang masih hidup jika dibandingkan dengan jumlah anak yang dilahirkan hidup menurut kelompok usia wanita subur 15 - 49 tahun keberadaannya semakin bertambah usia kelompok wanita maka menunjukkan kecenderungan anak yang masih hidup semakin berkurang.

Penghitungan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode baru dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013 – 2017) stabil berkisar pada angka 73 tahun. Pada Tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo 73,43 tahun; di tahun 2016 mencapai 73,67 tahun.

Tabel 3.2
Angka Harapan Hidup (tahun)
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017

Tahun	AHH
2013	73,43
2014	73,43
2015	73,63
2016	73,67
2017	73,71

Pada tahun 2017 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 73,71 tahun. Ini memberikan gambaran bahwa bayi-bayi yang lahir pada tahun 2017 secara umum mempunyai harapan hidup sampai berumur sekitar 73,71 tahun. Angka harapan hidup ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk lebih baik dari tahun sebelumnya.

3.3.2. Dimensi Pendidikan

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum kemajuan pendidikan suatu wilayah.

A. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung pada penduduk usia 7 tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada periode 2013 - 2016 angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo berada pada kisaran 13—14 tahun (tahun 2013 sebesar 13,25; tahun 2014 sebesar 13,55; tahun 2015 sebesar 13,89 dan tahun 2016 sebesar 14,13). Pada tahun 2017 angka harapan lama sekolah Sidoarjo mencapai 14,34 tahun.

Hal ini berarti pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Sidoarjo usia 7 tahun ke atas dapat mengenyam pendidikan formal sampai 14 tahun. Dengan penghitungan waktu normal maka jenjang pendidikan setingkat SD membutuhkan waktu 6 tahun, jenjang pendidikan setingkat SLTP membutuhkan waktu 3 tahun dan jenjang pendidikan setingkat SLTA membutuhkan waktu 3 tahun. Ini berarti pada tahun 2016 diharapkan penduduk Sidoarjo usia 7 tahun ke atas dapat mengenyam pendidikan sampai lulus jenjang pendidikan di atas SLTA, bisa mencapai jenjang Diploma I dan II (14 tahun pendidikan formal).

Tabel 3.3
 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017

Tahun	HLS
2013	13,25
2014	13,55
2015	13,89
2016	14,13
2017	14,34

B. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan seberapa lama rata-rata seseorang menempuh pendidikan formal. Lama menempuh pendidikan di sini bukan diartikan waktu yang dihabiskan untuk menempuh jenjang pendidikan namun merupakan waktu maksimal yang digunakan seseorang dalam menekuni pendidikan sekolah pada semua jenjang. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,23 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo menekuni pendidikan formal (sekolah) selama 10 tahun. Ketika pada jenjang pendidikan setingkat SD membutuhkan waktu normal 6 tahun dan pada jenjang pendidikan setingkat SLTP membutuhkan waktu normal 3 tahun; maka rata-rata penduduk Sidoarjo secara umum telah menamatkan pendidikan sampai pada jenjang setingkat SLTP, dan sudah melewati jenjang kelas 1 SMU.

Program wajib belajar 9 tahun telah sukses dilaksanakan. Bahkan secara rata-rata penduduk sudah mulai merasa perlu untuk mempunyai pendidikan lebih tinggi dari jenjang SLTP, yaitu sudah mulai beranjak ke jenjang pendidikan SMU dan SMK.

Tabel 3.4
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017

Tahun	RLS
2013	10,03
2014	10,09
2015	10,10
2016	10,22
2017	10,23

3.3.3. Dimensi Pengeluaran

Kemampuan masyarakat melakukan kegiatan konsumsi, dalam hal ini belanja tidaklah tetap melainkan selalu berubah-ubah; kadang naik, kadang turun. Ketidaktetapan kemampuan masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuatnya dapat terjadi; yaitu harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang dan waktu.

Kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingginya kemampuan daya beli. Semakin tinggi kemampuan daya beli masyarakat maka semakin baik kondisi ekonominya. Kemampuan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tingkat pendapatan, pola konsumsi dan perkembangan harga-harga.

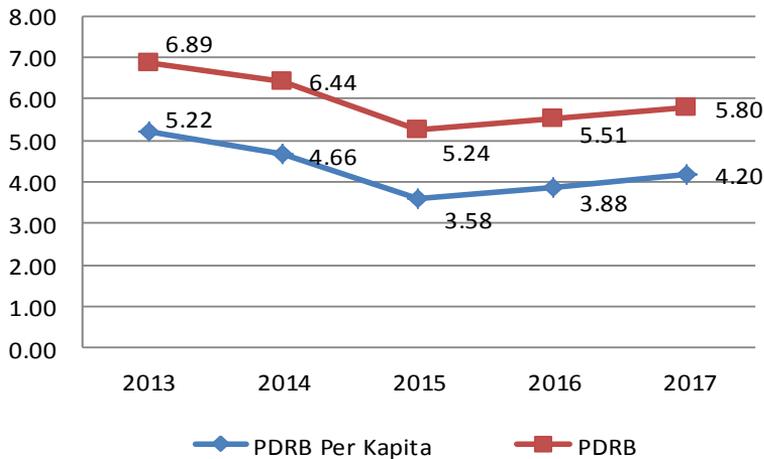
Perkembangan harga-harga akan mencerminkan tingkat inflasi. Jika terjadi kondisi pendapatan masyarakat turun sedangkan nilai inflasi naik maka kecenderungannya kemampuan daya beli masyarakat akan turun. Kalau dilihat secara umum kemampuan daya beli masyarakat tahun 2017 di Kabupaten Sidoarjo secara nominal mengalami peningkatan sebesar 3,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya nilai PDRB perkapita penduduk.

Tabel 3.5
 Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan
 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017

Tahun	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun
2013	12.602
2014	12.632
2015	12.879
2016	13.320
2017	13.710

Berdasarkan PDRB tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010, nilai PRDB per kapita sebesar 57,26 juta rupiah per tahun; naik 4,20 persen dari tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai Nilai PRDB per kapita terus meningkat meskipun peningkatan pertahunnya tidak tajam.

Gambar 3.1
 Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PDRB
 Perkapita (ADHK) Kabupaten Sidoarjo (persen)
 Tahun 2013-2017



LAMPIRAN



Angka IPM dan Rangking IPM Kabupaten Sidoarjo Se Jawa Timur, Tahun 2010-2017

Tahun	Angka IPM	Rangking
2010	73,75	4
2011	74,48	4
2012	75,14	4
2013	76,39	4
2014	76,78	4
2015	77,43	4
2016	78,17	4
2017	78,70	4

Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2010-2017

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Indeks Kesehatan
2010	73,42	0,82
2011	73,42	0,82
2012	73,43	0,82
2013	73,43	0,82
2014	73,43	0,82
2015	73,63	0,83
2016	73,67	0,83
2017	73,71	0,83



Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2010-2017

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
2010	9,22	12,37	0,65
2011	9,50	12,42	0,66
2012	9,70	12,54	0,67
2013	10,03	13,25	0,70
2014	10,09	13,55	0,71
2015	10,10	13,89	0,72
2016	10,22	14,13	0,73
2017	10,23	14,34	0,74

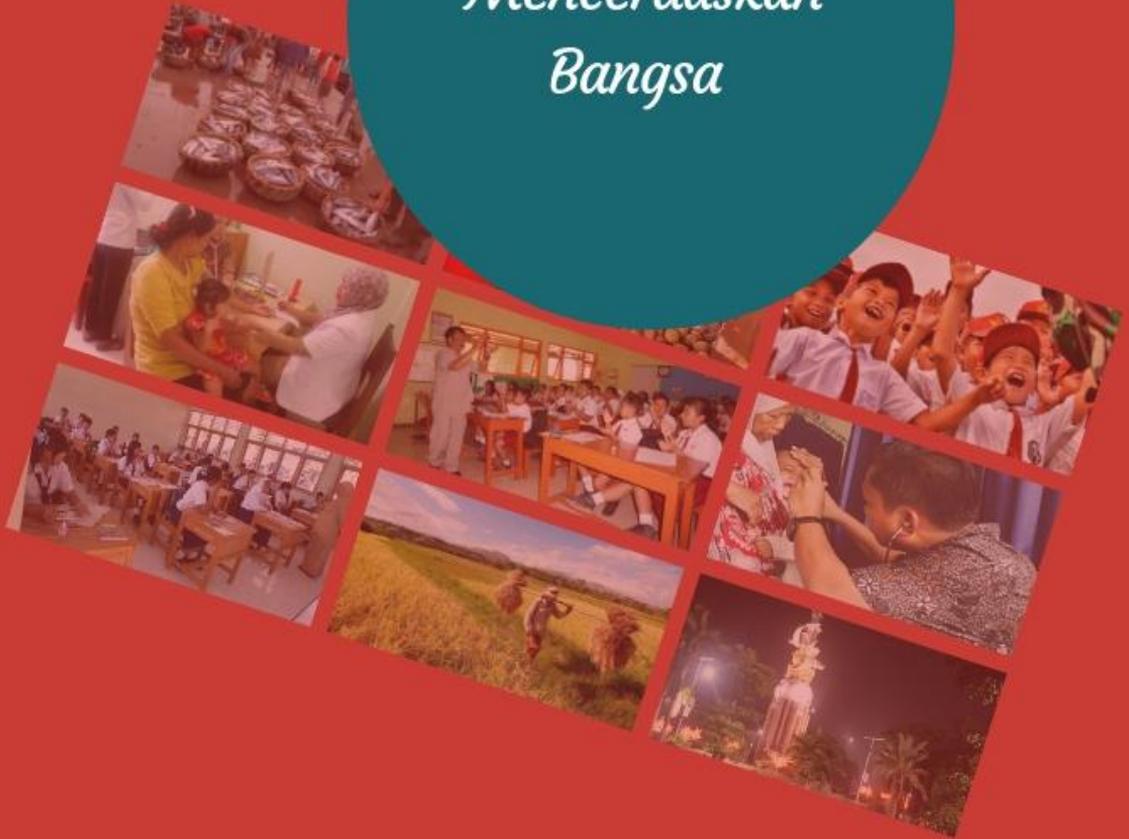
4

**Nilai Pengeluaran dan Indeks Daya Beli
Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2010-2017**

Tahun	Nilai Pengeluaran (juta rupiah/tahun/ orang)	Indeks Daya Beli
2010	11.717	0,75
2011	12.095	0,76
2012	12.457	0,77
2013	12.602	0,77
2014	12.632	0,77
2015	12.879	0,78
2016	13.320	0,79
2017	13.710	0,80

DATA

*Mencerdaskan
Bangsa*



Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Jalan Pahlawan No.140 Sidoarjo

Telpon : (031) 8941744, (031)8946473

email : bps3515@bps.go.id